



PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

Siti Noor Jannah¹ Yufita Listiana²

Article history:

Submitted: 26 Agustus 2025

Revised: 8 April 2026

Accepted: 30 April 2026

Keywords:

Budget Efficiency Ratio;

Economic Growth;

Fiscal Decentralisation

Degree Ratio;

Human Development Index;

Regional Fiscal Independence

Ratio;

Abstract

The Human Development Index conditions (HDI) in East Java are in the high category and tend to increase, but they do not align with the relatively low regional financial performance. This discrepancy indicates a gap between human development achievements and regional fiscal capacity. This study aims to analyze the effect of regional financial performance on the HDI both directly and through economic growth as an intervening variable in the regency/city in East Java for the years 2020–2022. The data analysis technique uses Path Analysis through SmartPLS version 4. Secondary data were obtained from the DJPK Kemenkeu website and BPS of East Java Province. Research results show that the ratio of fiscal decentralization degree and the budget efficiency ratio have a positive and significant effect on economic growth, while the fiscal independence ratio does not have a significant effect. Economic growth is proven to have a positive and significant effect on the HDI. In addition, economic growth is able to mediate the influence of the fiscal decentralization degree ratio and budget efficiency ratio on the HDI, but it is not able to mediate the influence of the fiscal independence ratio on the HDI. Based on these results, local governments need to focus policies on increasing the degree of fiscal decentralization and budget efficiency, as they have been proven to play a role in promoting economic growth and improving the HDI, but must be balanced with effective budget management to impact human development.

Kata Kunci:

Indeks Pembangunan Manusia;
Pertumbuhan Ekonomi;

Rasio Derajat Desentralisasi
Fiskal;

Rasio Efisiensi Anggaran;

Rasio Kemandirian Fiskal
Daerah;

Abstrak

Kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur berada pada kategori tinggi dan cenderung meningkat, namun tidak sejalan dengan kinerja keuangan daerah yang relatif masih rendah. Ketidakesesuaian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian pembangunan manusia dan kemampuan fiskal daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap IPM secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening pada kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2020–2022. Teknik analisis data menggunakan *Path Analysis* melalui *SmartPLS* versi 4. Data sekunder diperoleh dari website DJPK Kemenkeu dan BPS Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio efisiensi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio kemandirian fiskal tidak berpengaruh signifikan. Pertumbuhan ekonomi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sementara, pertumbuhan ekonomi mampu memediasi pengaruh rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio efisiensi anggaran terhadap IPM, tetapi tidak mampu memediasi pengaruh rasio kemandirian fiskal terhadap IPM. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah daerah perlu memfokuskan kebijakan pada peningkatan derajat desentralisasi fiskal dan efisiensi anggaran, karena terbukti berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM, tetapi harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang efektif agar berdampak pada pembangunan manusia.

Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Trunojoyo

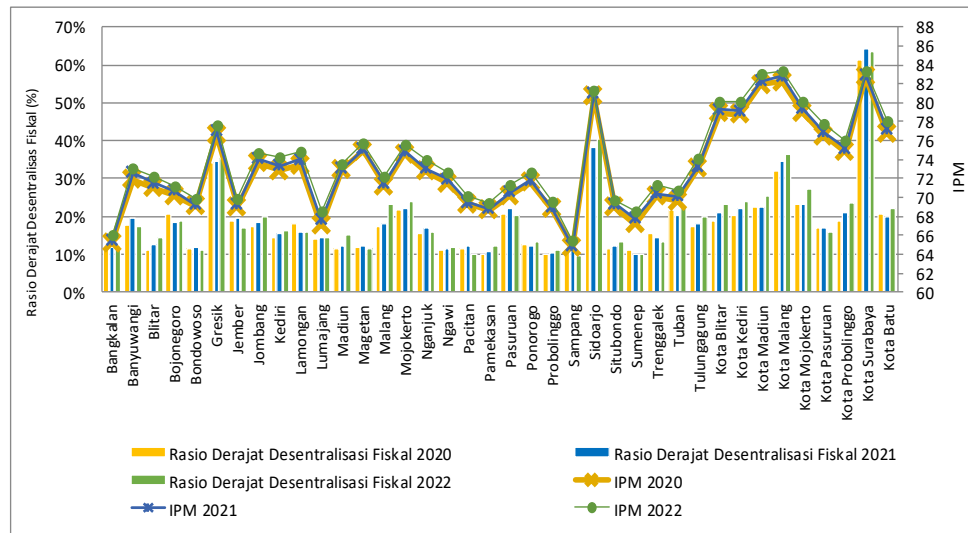
Madura, Jawa Timur,
Indonesia

Email:

sitinoorjannah14@gmail.com

Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur,
Siti Noor Jannah & Yufita Listiana

ekonomi dalam jangka panjang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Dengan kata lain, efek fiskal terhadap IPM lebih optimal ketika diiringi pertumbuhan ekonomi yang positif (Diba *et al.*, 2022). Faktanya, masih terdapat ketidaksesuaian antara capaian pertumbuhan ekonomi dengan kinerja keuangan daerah. Peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonominya melalui belanja pemerintah yang dialokasikan untuk kegiatan belanja pendidikan, kesehatan dan lainnya sangat diperlukan (Khusaini, 2020). Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan rasio keuangan dapat membantu dalam menentukan strategi pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien, serta memperbaiki kinerja ekonomi (Lupita & Rahman, 2025).

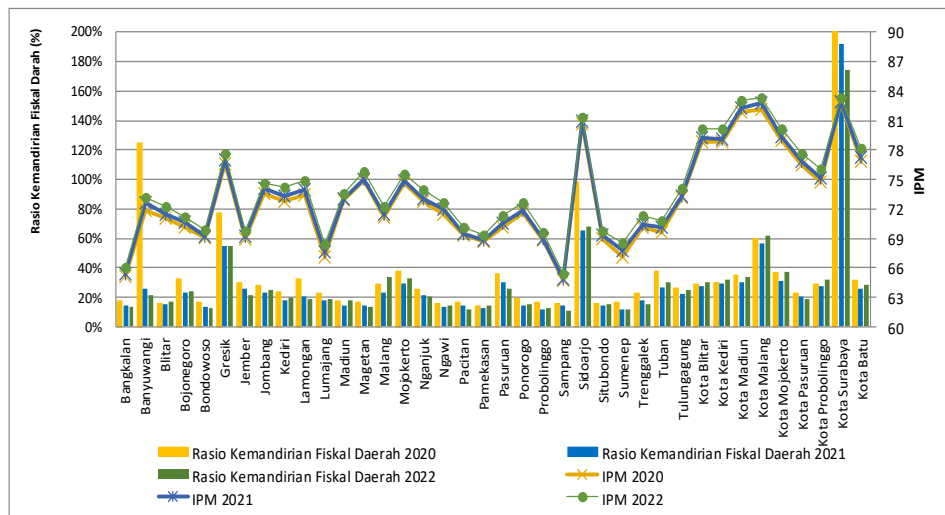


Sumber : Badan Pusat Statistik dan DJPK Kemenkeu yang diolah, 2024

Gambar 2. Data Gap Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dengan Indeks Pembangunan Manusia 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020-2022

Gambar 2 menunjukkan bahwa rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal pada kabupaten/kota di Jawa Timur berada pada kisaran 10 persen hingga 30 persen, yang mengindikasikan kapasitas fiskal daerah masih relatif rendah. Namun demikian, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada daerah tersebut berada pada kisaran 70 hingga 80, yang tergolong tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kemampuan fiskal daerah dengan capaian pembangunan manusia. Secara teoritis, rasio derajat desentralisasi fiskal mencerminkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah, di mana semakin tinggi rasio tersebut maka semakin besar kemampuan daerah dalam mendukung pembangunan (Wibawa & Arif, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Hamimah & Zulkarnain (2020) menyatakan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di Jawa Barat. Adanya desentralisasi fiskal dapat memperkuat kemampuan keuangan daerah yang digunakan untuk berbagai program pembangunan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

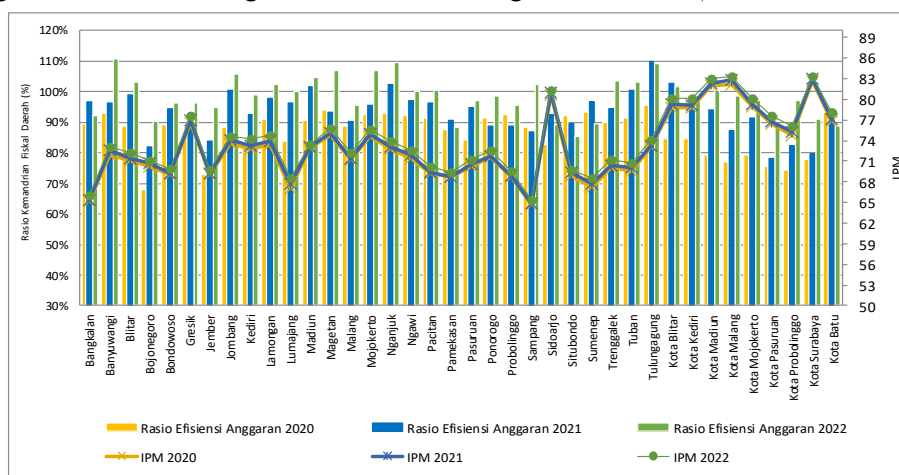
Diberlakukannya otonomi daerah juga tidak terlepas dari sistem desentralisasi. Desentralisasi yaitu pembagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab terkait penganggaran untuk pembangunan pelayanan publik, yang tentunya membutuhkan berbagai sumber dana (Digdowiseiso & Satrio, 2022). Pada tahun 2001 pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang bertujuan untuk melakukan pemerataan dengan mengatasi ketidakseimbangan vertikal dan horizontal dengan memberikan insentif bagi pemerintah daerah untuk pembangunan daerah (Made & Suyana, 2024). Pemerintah daerah diberi mandat untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktanya, diterapkannya desentralisasi pemerintah daerah belum mampu melaksanakan desentralisasi dengan semestinya tetapi pertumbuhan ekonomi meningkat diiringi dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.



Sumber : Badan Pusat Statistik, (2024) dan DJPK Kemenkeu yang diolah

Gambar 3. Data Gap Rasio Kemandirian Fiskal Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020-2022

Gambar 3. menunjukkan bahwa rata-rata rasio kemandirian fiskal pada kabupaten/kota di Jawa Timur berada pada kisaran 20 persen hingga 30 persen. Data menunjukkan kabupaten/kota tersebut rata-rata tingkat kemandiriannya masih tergolong rendah atau instruktif, artinya peran pemerintah lebih mendominasi. Hal ini dikarenakan suatu daerah belum mampu menjalankan otonomi daerah secara mandiri. Akan tetapi Indeks Pembangunannya meningkat dan sudah tergolong tinggi. Rasio kemandirian fiskal daerah merupakan ukuran kinerja keuangan daerah yang menunjukkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Semakin tinggi nilai rasio kemandirian fiskal daerah maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri dan semakin rendah tingkat ketergantungan pada pendapatan transfer, begitupun sebaliknya (Wibawa & Arif, 2022). Penelitian terdahulu menyatakan bahwa rasio kemandirian fiskal daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Kemandirian daerah yang berpengaruh positif menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal sudah berjalan sebagaimana mestinya, artinya apabila tingkat kemandirian tinggi maka Indeks Pembangunan Manusia juga meningkat (Rahma *et al.*, 2022). Berbeda dengan penelitian terdahulu lainnya yang menyatakan bahwa rasio kemandirian fiskal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Meskipun daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah tinggi belum tentu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Hermawan *et al.*, 2024)

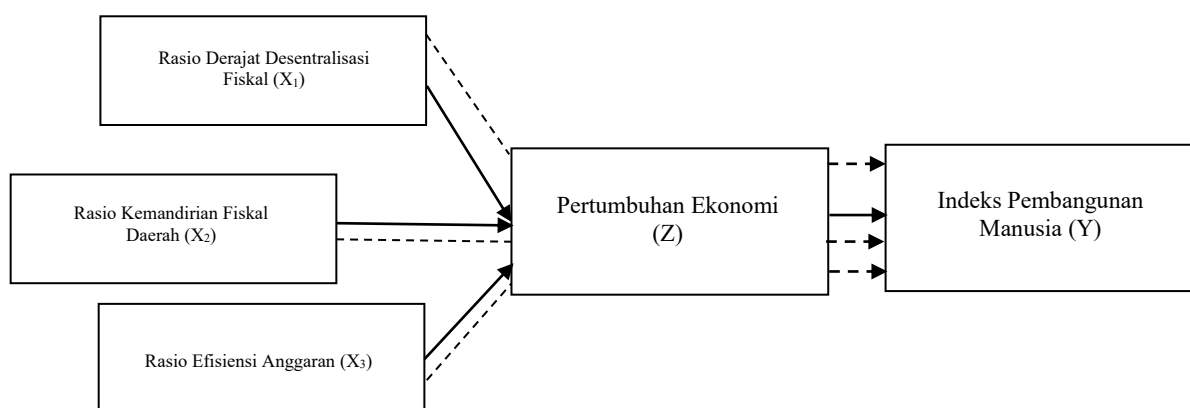


Sumber : Badan Pusat Statistik, (2024) dan DJPK Kemenkeu yang diolah

Gambar 4. Data Gap Rasio Efisiensi Anggaran dengan Indeks Pembangunan Manusia 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020-2022

Gambar 4 menunjukkan bahwa rata-rata rasio efisiensi anggaran pada kabupaten/kota tersebut berada pada kisaran 80 persen hingga 90 persen ke atas, yang artinya kinerja keuangan daerah masih tergolong kurang efisien. Akan tetapi angka IPM meningkat dan tergolong tinggi. Rasio efisiensi anggaran merupakan ukuran kinerja keuangan daerah menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah dapat menghasilkan berbagai output yang maksimal akan tetapi dengan input atau anggaran yang terbatas. Semakin kecil rasio efisiensi anggaran maka semakin efisien. Sedangkan semakin besar presentase rasio efisiensi anggaran maka suatu daerah tingkat rasionya tergolong tidak efisien. Angka IPM Jawa Timur berada pada kategori tinggi dan telah melebihi rata-rata nasional, akan tetapi Provinsi Jawa Timur belum menduduki urutan 10 besar di Indonesia. Faktanya dalam lingkup Provinsi Jawa Timur, kabupaten/kota yang memiliki IPM tinggi masih menghadapi kendala dalam kinerja keuangan. Hanya 10,5 persen dari total kabupaten/kota yang menunjukkan kinerja keuangan yang optimal, yang dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi dan IPM pada daerah tersebut sejalan dengan pengelolaan anggaran yang efisien dan mandiri. Sementara 89,5 persen lainnya, meskipun mencatat kenaikan nilai IPM, masih mengalami kendala dalam mengelola anggaran yang kurang efisien dengan tingkat kemandirian rendah.

Berdasarkan fenomena tersebut, hubungan antara fiskal daerah dan pembangunan manusia dapat dijelaskan melalui Teori Federalisme Fiskal yang dikemukakan oleh Oates pada tahun 1972, menyatakan bahwa terdapat hubungan antara keuangan dengan pemerintahan, artinya adanya pembagian kewenangan pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam menjalankan urusan pemerintahannya sendiri, tujuannya untuk membangun daerah menjadi lebih baik demi tercapainya masyarakat yang sejahtera dengan kualitas hidup yang baik (Puspita & Hamidi, 2021). Dengan pengelolaan fiskal yang baik, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang berdampak pada peningkatan IPM. Faktanya, diterapkannya desentralisasi pemerintah daerah belum mampu melaksanakan desentralisasi dengan semestinya tetapi pertumbuhan ekonomi meningkat diiringi dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Kerangka konseptual berikut dikembangkan yang didasarkan atas penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut.



Sumber : Penelitian Terdahulu (Hermawan *et al.*, 2024)

Gambar 5. Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Jawa Timur tahun 2020–2022. Data yang digunakan bersifat sekunder, meliputi data APBD dan RAPBD kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2020-2022 dari website

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan serta data dari Badan Pusat Statistik berupa Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2020-2022. Teknik analisis menggunakan Path Analysis berbasis Partial Least Squares (PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4 dimaksudkan sebagai alat bantu memperoleh koefisien jalur dan tingkat signifikansi hubungan antar variabel. Meskipun PLS biasanya digunakan untuk konstruk laten dengan indikator multi-item, pendekatan ini juga dapat diterapkan pada variabel observabel tunggal untuk menganalisis hubungan struktural secara prediktif (Gunistiyo *et al.*, 2024).

Pendekatan ini dipilih, juga karena bersifat fleksibel terhadap ukuran sampel dan tidak memerlukan distribusi normal yang ketat. Penelitian ini menggunakan variabel observabel tunggal, sehingga fokus evaluasi hanya pada R^2 (koefisien determinasi) untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dan Path Coefficient untuk menguji signifikansi koefisien jalur melalui nilai t-statistik dan p-value. Selain itu, analisis pengaruh tidak langsung digunakan untuk menguji peran variabel intervening dalam model penelitian. Dengan demikian, pendekatan ini konsisten dengan tujuan penelitian, yaitu menguji hipotesis hubungan sebab-akibat antar variabel fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan IPM di Jawa Timur. Berikut ini parameter evaluasi:

Tabel 1.
Parameter Evaluasi Inner Model

Evaluasi Inner Model	Penjelasan	Kriteria
R-Squared (<i>Coefficient Determinance</i>)	Mengukur seberapa baik variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen	0,19 pengaruh model lemah 0,33 pengaruh model moderat/sedang 0,67 pengaruh model kuat
Estimasi koefisien jalur (<i>Path Coefficient</i>)	Melihat nilai estimasi untuk hubungan jalur dalam model structural	Nilai Original Sampel: -Positif : menunjukkan kecenderungan hubungan variabel searah -Negatif: Kecenderungan hubungan variabel terbalik Nilai T Statistik dan P-Value menentukan pengaruh antar variabel jika: • Nilai t-statistik >1,96 signifikan (5 persen) • Nilai P-value < 0,05

Sumber : Gunistiyo *et al.*, (2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dimana hanya terdapat indikator tunggal sehingga memfokuskan pada Evaluasi Inner Model tujuannya untuk memastikan bahwa model struktural yang dihipotesiskan memiliki kesesuaian yang baik dan mengetahui signifikansi hubungan antar variabel. Parameter yang digunakan dalam Evaluasi Inner Model yaitu R-Square (*Coefficient Determinant*) dan Estimasi koefisien jalur (*Path Coefficient*) meliputi *Path Coefficient Direct Effect* dan *Path Coefficient Indirect Effect*.

Pengukuran pada koefisien determinasi (R^2) untuk menggambarkan nilai kecocokan model regresi dengan melihat besarnya nilai *Adjusted R-Squared* persamaan model statistik dalam program *SmartPLS* versi 4.

Tabel 2.
Hasil Uji R-Square (*Coefficient Determinance*)

Variabel Endogen/Dependen	Adj R-Squared
Pertumbuhan Ekonomi	0,341
Indeks Pembangunan Manusia	0,177

Sumber : Data yang diolah, 2026

Tabel 2 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi bahwa variabel independen yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian fiskal daerah, dan rasio efisiensi anggaran mampu menjelaskan 34,1 persen variasi pada variabel pertumbuhan ekonomi dengan nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,341, sementara 65,9 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Hubungan antara variabel independen dan variabel intervening ini dapat dikategorikan sebagai moderat/edang. Sementara itu, variabel pertumbuhan ekonomi hanya mampu menjelaskan 17,7 persen variasi pada variabel Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,177, sehingga hubungan antara kedua variabel ini dapat dikategorikan sebagai lemah.

Pengukuran estimasi koefisien jalur juga dilakukan untuk menentukan apakah antara hubungan antar variabel dalam model dapat dianggap signifikan secara statistik. Pengujian ini menggunakan teknik *bootstrapping*, hasilnya dilaporkan dalam bentuk nilai t-statistik atau p-value. Sebuah hubungan bernilai signifikan apabila p-value kurang dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Koefisien jalur yang signifikan menunjukkan bahwa hubungan antar variabel memiliki dukungan statistik yang kuat. Path koefisien *direct effect* digunakan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan langsung.

Tabel 3.
Hasil Path Coefficient Direct Effect

	Original sample (O)	T statistics (O/STDEV)	P values	Hipotesis
RDDF -> PE	0,932	3,561	0,001	H ₁ diterima
RKMD -> PE	-0,500	1,913	0,058	H ₂ ditolak
REA -> PE	0,342	4,201	0,000	H ₃ diterima
PE -> IPM	0,430	5,273	0,000	H ₄ diterima

Sumber : Data yang diolah, 2026

Tabel 3 menunjukkan hasil output dari path koefisien *direct effect*. Hasil uji tersebut dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan hasil path koefisien *direct effect* yaitu 0,932. Diketahui nilai t-statistik sebesar 3,561 > dari 1,96. Pada tingkat signifikansi 5 persen, nilai P-Value sebesar 0,001 < 0,05. Hal ini membuktikan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian rasio kemandirian fiskal daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan hasil path koefisien *direct effect* yaitu -0,500. Diketahui nilai t-statistik sebesar 1,913 < dari 1,96. Pada tingkat signifikansi 5 persen, nilai P-Value sebesar 0,058 > 0,05. Hal ini membuktikan bahwa rasio kemandirian fiskal daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio efisiensi anggaran berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan hasil path koefisien *direct effect* yaitu 0,342. Diketahui nilai t-statistik sebesar 4,201 > dari 1,96. Pada tingkat signifikansi 5 persen, nilai P-Value sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini membuktikan bahwa rasio efisiensi anggaran berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dengan hasil path koefisien *direct effect* yaitu 0,430. Diketahui nilai t-statistik sebesar 5,273 > dari 1,96. Pada tingkat signifikansi 5 persen, nilai P-Value sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sementara itu, Path koefisien *indirect effect* digunakan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan tidak langsung antara variabel eksogen terhadap variabel endogen melalui variabel intervening.

Tabel 6.
Hasil Path Coefficient Indirect Effect

	Original sample (O)	T statistics (O/STDEV)	P values	Hipotesis
RDDF -> PE -> IPM	0,400	2,572	0,011	H ₅ diterima
RKMD -> PE -> IPM	-0,215	1,667	0,098	H ₆ ditolak
REA -> PE -> IPM	0,147	3,555	0,001	H ₇ diterima

Sumber : Data yang diolah, 2026

Tabel 6. menunjukkan hasil output path koefisien *indirect effect*. Hasil menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening dijelaskan bahwa pada persamaan jalur satu yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal → pertumbuhan ekonomi → Indeks Pembangunan Manusia, dengan hasil path koefisien *indirect effect* yaitu 0,400. Diketahui nilai t-statistik sebesar $2,572 > \text{dari } 1,96$. Pada tingkat signifikansi 5 persen, nilai P-Value sebesar $0,011 < 0,05$. Hal ini berarti rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Pada persamaan jalur kedua yaitu rasio kemandirian fiskal daerah → pertumbuhan ekonomi → Indeks Pembangunan Manusia, dengan hasil path koefisien *indirect effect* yaitu -0,215. Diketahui nilai t-statistik sebesar $1,667 < \text{dari } 1,96$. Pada tingkat signifikansi 5 persen, nilai P-Value sebesar $0,098 > 0,05$. Hal ini berarti rasio kemandirian fiskal daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Pada persamaan jalur ketiga yaitu rasio efisiensi anggaran → pertumbuhan ekonomi → Indeks Pembangunan Manusia, dengan hasil path koefisien *indirect effect* yaitu 0,147. Diketahui nilai t-statistik sebesar $3,555 > \text{dari } 1,96$. Pada tingkat signifikansi 5 persen, nilai P-Value sebesar $0,001 < 0,05$. Hal ini berarti rasio efisiensi anggaran berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening.

PEMBAHASAN

Hasil analisis persamaan jalur atau *Path Analysis* menyatakan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal memiliki pengaruh langsung yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan nilai path koefisien *direct effect* yaitu 0,932. Artinya setiap peningkatan satu satuan pada rasio derajat desentralisasi fiskal maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat sebesar 0,932. Uji t-statistik juga mendukung dengan nilai t-statistik sebesar $3,561 > \text{dari } 1,96$, serta nilai P-Value sebesar $0,001 < 0,05$. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori Federalisme Fiskal yang dikemukakan oleh Oates yang menyatakan bahwa adanya desentralisasi atau pembagian kewenangan kepada pemerintah daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Puspita & Hamidi, 2021). Pengaruh positif dan signifikan yang ditemukan pada analisis ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat keterbatasan dalam kapasitas fiskal, rasio derajat desentralisasi fiskal tetap berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur. Pada era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan dan membuat keputusan yang tepat, sehingga dapat meningkatkan kapasitas fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan aktivitas ekonomi pada berbagai sektor dan melaksanakan pengoptimalan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini telah mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hermawan *et al.*, (2024) yang membuktikan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin tinggi rasio derajat desentralisasi fiskal, maka semakin tinggi juga pertumbuhan ekonomi.

Hasil analisis persamaan jalur atau *Path Analysis* menyatakan bahwa rasio kemandirian fiskal daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan nilai path koefisien *direct effect* yaitu -0,500, artinya setiap peningkatan satu satuan pada rasio kemandirian fiskal daerah maka pertumbuhan ekonomi juga akan menurun sebesar 0,500. Uji t-statistik juga mendukung dengan nilai t-statistik sebesar $1,913 < \text{dari } 1,96$, serta nilai P-Value sebesar $0,058 > 0,05$. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan teori federalisme fiskal pada teori generasi kedua (*new prespective theories*), teori tersebut dikembangkan oleh Musgrave dan Oates yang menyatakan dengan adanya desentralisasi fiskal pada suatu daerah, peran pemerintah pusat telah dibatasi pada kegiatan pembangunan di daerah, maka pemerintah daerah mempunyai wewenang lebih besar untuk melaksanakan urusannya secara mandiri terkait dengan pemerintahan (Puspita & Hamidi, 2021).

Pengaruh negatif dan signifikan yang ditemukan pada analisis ini, menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Fiskal tidak selalu menjadi faktor paling penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Pemanfaatan dana transfer dari pusat pada dasarnya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena tidak dapat dipungkiri bahwa dana transfer dianggap sebagai sumber pendapatan terbesar oleh setiap daerah di Jawa Timur yang digunakan untuk pembangunan. Namun, jika setiap daerah tersebut hanya mengandalkan pendapatan transfer saja maka daerah tidak akan dapat mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah, sehingga tingkat ketergantungan akan semakin tinggi. Oleh sebab itu keduanya harus berjalan seimbang atau beriringan.

Hasil analisis persamaan jalur atau *Path Analysis* menyatakan bahwa rasio efisiensi anggaran memiliki pengaruh langsung yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan nilai path koefisien *direct effect* yaitu 0,342. Artinya setiap peningkatan satu satuan pada rasio efisiensi anggaran maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat sebesar 0,342. Uji t-statistik juga mendukung dengan nilai t-statistik sebesar 4,201 > dari 1,96, serta nilai P-Value sebesar 0,000 < 0,05. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori federalisme fiskal, teori tersebut dikembangkan oleh Musgrave dan Oates yang menekankan terkait pentingnya pembagian otoritas kewenangan dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan. Berdasarkan pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*), sistem pengelolaan anggaran daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal saling terkait erat, pengelolaan anggaran daerah yang baik dapat meningkatkan efisiensi anggaran (Puspita & Hamidi, 2021). Pengaruh positif dan signifikan yang ditemukan pada analisis ini mengindikasikan bahwa efisiensi anggaran juga menjadi faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Hal tersebut membuktikan meskipun anggaran belanja daerah masih terbatas, jika dalam realisasi anggaran belanja daerah Pemerintah Jawa Timur lebih fokus pada penggunaan dana untuk program-program yang langsung berdampak pada sektor-sektor ekonomi produktif, seperti infrastruktur yang mendukung sektor industri dan perdagangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hasil analisis persamaan jalur atau *Path Analysis* menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh langsung yang positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini dibuktikan dengan nilai path koefisien *direct effect* yaitu 0,430. Artinya setiap peningkatan satu satuan pada Rasio Efisiensi Anggaran maka Pertumbuhan Ekonomi juga akan meningkat sebesar 0,430. Uji t-statistik juga mendukung dengan nilai t-statistik sebesar 5,273 > dari 1,96, serta nilai P-Value sebesar 0,000 < 0,05. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Profesor Kuznet dimana salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya output. Tingginya pertumbuhan output menjadikan perubahan pola konsumsi kemudian meningkatkan daya beli masyarakat sebagai salah satu indeks komposit Indeks Pembangunan Manusia (Diba *et al.*, 2022). Perekonomian yang tumbuh akan diiringi dengan peningkatan kesejahteraan tentunya akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat (Nur *et al.*, 2023). Pengaruh positif dan signifikan yang ditemukan pada analisis ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi memegang peranan penting dalam meningkatkan IPM. Pengaruh signifikan tersebut berarti peningkatan kegiatan ekonomi dapat mengarah pada peningkatan produksi barang atau jasa, peningkatan pendapatan dan peningkatan akses layanan publik, sehingga pertumbuhan ekonomi berperan sebagai penggerak pembangunan manusia. Hasil penelitian ini membuktikan kalau di Jawa Timur pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkembang tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga memberikan dampak langsung dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat, yang tercermin dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia secara keseluruhan. Hasil penelitian ini ternyata juga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hermawan *et al.*, (2024) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini berarti, apabila pertumbuhan ekonomi naik maka Indeks Pembangunan Manusia juga naik.

Hasil analisis persamaan jalur atau *Path Analysis* menyatakan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal memiliki pengaruh tidak langsung yang positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Hal ini dibuktikan dengan nilai path koefisien *indirect effect* yaitu 0,400. Artinya setiap peningkatan satu satuan pada rasio derajat desentralisasi fiskal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diikuti dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,400. Uji t-statistik juga mendukung dengan nilai t-statistik sebesar $2,572 >$ dari 1,96, serta nilai P-Value sebesar $0,011 < 0,05$. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori federalisme fiskal yang dikemukakan oleh Oates yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui desentralisasi (Puspita & Hamidi, 2021). Ekonomi yang tumbuh akan diiringi dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat (Nur *et al.*, 2023). Pada era desentralisasi, setiap kabupaten/kota pemberian kewenangan akan membuat pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya serta dapat memperkuat kemampuan keuangan untuk mendukung program pembangunan. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan potensi desentralisasi fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Jawa Timur harus terus meningkatkan kapasitas keuangan dan tingkat tata kelola pemerintahannya. Meskipun ketergantungan pada transfer dana pusat masih ada, hal ini membuktikan bahwa desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengembangkan setiap peluang daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia pada masing-masing daerah. Pada praktik desentralisasi, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk membuat suatu terobosan sebagai respons terhadap berbagai masalah yang dihadapi (Puspita & Hamidi, 2021). Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lupita & Rahman (2025) yang menyatakan derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil analisis persamaan jalur atau *Path Analysis* menyatakan bahwa rasio kemandirian fiskal daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Hal ini dibuktikan dengan nilai path koefisien *indirect effect* yaitu -0,215. Artinya setiap peningkatan satu satuan pada rasio kemandirian fiskal daerah akan menurunkan pertumbuhan ekonomi, diikuti dengan penurunan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,215. Uji t-statistik juga mendukung dengan nilai t-statistik sebesar $1,667 <$ dari 1,96, serta nilai P-Value sebesar $0,098 > 0,05$. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan teori federalisme fiskal pada teori generasi kedua (*new prespective theories*), teori tersebut dikembangkan oleh Musgrave dan Oates adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah mempunyai wewenang yang lebih besar dalam melaksanakan urusannya secara mandiri terkait dengan pemerintahan (Puspita & Hamidi, 2021). Selain itu, teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Profesor Kuznet dimana karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya output. Tingginya pertumbuhan output menjadikan perubahan pola konsumsi kemudian meningkatkan daya beli masyarakat sebagai salah satu indeks komposit Indeks Pembangunan Manusia (Diba *et al.*, 2022). Pengaruh negatif dan signifikan ditemukan pada analisis ini, menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Fiskal Daerah tidak selalu menjadi faktor paling penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dimediasi pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Timur. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal yang rendah tidak selalu menghambat kemajuan ekonomi dan pembangunan sosial. Mengingat kondisi ketergantungan setiap daerah di Jawa Timur pada pendapatan transfer juga tinggi, asalkan kebijakan terkait pengalokasian anggaran yang tepat untuk mendorong sektor ekonomi maka bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kualitas hidup masyarakat Jawa Timur masih dapat ditingkatkan melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inisiatif pembangunan yang terarah. Peningkatan pada pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada dimensi Indeks Pembangunan Manusia seperti kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Dampak tersebut melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan sehingga berkontribusi pada meningkatnya

daya beli masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Hasil analisis persamaan jalur atau *Path Analysis* menyatakan bahwa rasio efisiensi anggaran memiliki pengaruh tidak langsung yang positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Hal ini dibuktikan dengan nilai path koefisien *indirect effect* yaitu 0,147. Artinya setiap peningkatan satu satuan pada rasio efisiensi anggaran akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diikuti dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,147. Uji t-statistik juga mendukung dengan nilai t-statistik sebesar $3,555 > 1,96$, serta nilai P-Value sebesar $0,001 < 0,05$. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori federalisme fiskal pada teori generasi kedua (*new prespective theories*), teori tersebut dikembangkan oleh Musgrave dan Oates yang menekankan terkait pengeluaran antar pemerintahan (Puspita & Hamidi, 2021). Pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat menggunakan anggaran secara efisien (Wibawa & Arif, 2022). Pengaruh positif dan signifikan yang ditemukan pada analisis ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam pengelolaan anggaran, keberhasilan dalam menciptakan kebijakan yang fokus pada sektor-sektor unggulan dapat mengurangi dampak negatif ketidakefisienan dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap dapat tercapai. Pertumbuhan ekonomi yang stabil ini, turut mendukung perbaikan kualitas hidup masyarakat di Jawa Timur, yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun rasio efisiensi anggaran di Jawa Timur masih perlu diperbaiki, dengan kebijakan pembangunan yang tepat dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengaruh positif dan signifikan yang ditemukan pada analisis ini, menunjukkan bahwa meskipun terdapat keterbatasan dalam anggaran belanja, rasio efisiensi anggaran tetap berperan penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan perolehan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien sebesar 0,932, t-statistik 3,561 ($> 1,96$), dan p-value 0,001 ($< 0,05$). Sementara itu, rasio kemandirian fiskal daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien -0,500, t-statistik 1,913 ($< 1,96$), dan p-value 0,058 ($> 0,05$), yang menunjukkan bahwa kemandirian fiskal belum menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Di sisi lain, rasio efisiensi anggaran terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien 0,342, t-statistik 4,201 ($> 1,96$), dan p-value 0,000 ($< 0,05$), sehingga efisiensi dalam pengelolaan anggaran menjadi faktor penting dalam meningkatkan aktivitas ekonomi daerah. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai koefisien sebesar 0,430, t-statistik 5,273 ($> 1,96$), dan p-value 0,000 ($< 0,05$), yang berarti peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pada pengujian pengaruh tidak langsung, rasio derajat desentralisasi fiskal terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar 0,400, t-statistik 2,572 ($> 1,96$), dan p-value 0,011 ($< 0,05$). Sebaliknya, rasio kemandirian fiskal daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi dengan koefisien -0,215, t-statistik 1,667 ($< 1,96$), dan p-value 0,098 ($> 0,05$). Adapun rasio efisiensi anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien 0,147, t-statistik 3,555 ($> 1,96$), dan p-value 0,001 ($< 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa faktor yang paling konsisten berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan IPM adalah derajat desentralisasi fiskal dan efisiensi anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah daerah di Jawa Timur disarankan untuk terus meningkatkan derajat desentralisasi fiskal dan efisiensi anggaran karena terbukti memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM. Selain itu, pemerintah daerah perlu tetap mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tujuannya untuk meningkatkan kemandirian fiskal, meskipun dalam penelitian ini belum menunjukkan pengaruh signifikan. Pengalokasian anggaran juga perlu difokuskan pada sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja keuangan daerah secara berkelanjutan untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang relevan agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2024). Provinsi Jawa Timur dalam angka province in figures 2024 (E. Trisusanti (ed.)). BPS Provinsi Jawa Timur. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzYjMg==/ipm.html>
- Diba, A., Fathorrazi, M., & Somaji, R. (2022). Pengaruh Kemiskinan, PDRB, dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Ekuilibrium (JEK)*, 2(1), 17. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEK>
- Digdowiseiso, K., & Satrio, M. B. (2022). Pengaruh rasio kemandiriann keuangan daerah dan rasio ketergantungan fiskal terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten dan kota provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 1170–1181. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1167>
- Gunistiyo, Noviany, D., & Prihadi, D. (2024). *Metodologi Penelitian Modern : Panduan SmartPLS yang Praktis untuk Peneliti* (Dilengkapi dengan studi kasus). Badan Penerbit Universitas Pancasakti Tegal.
- Hamimah, & Zulkarnain. (2020). Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap IPM kabupaten/kota di Jawa Barat. *Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan)*, 1(2), 11–18. <https://doi.org/10.30812/rekan.v1i2.922>
- Hermawan, A., Satriawan, B., & Dewi, N. P. (2024). The effect of independence ratio , fiscal decentralization degree and PAD effectiveness on Human Development Index throught economic growth. *Jurnal Garuda*, 3(2), 198–210.
- Karyono, Y., Tusianti, E., Gunawan, I. G. N. A. R., & Adi, N. (2021). IPM Indonesia 2020 (Badan Pusat Statistik (ed.)). Badan Pusat Statistik. https://web-api.bps.go.id/download.php?f=liJOc9bcHBZ096iNq3g6eDVWcitLNIVWK3luWXkyMkNveHNjaitXSWx5eTVWKzFpM0FNUjZqci9hdHRWaW4ydyjRpUktKeFNRMXRsbFE2QUNPZWFWZWVo0aHRpRHHVUN_GQ2NzliejBKZHBudE5IMmVKTDhNZXJ2NGo1cUZGaWthSk14UjJ0Q3Arbyymb2dZaThIR3FHZmw4UkdnUEhlQ25iRH
- Khusaini, M. (2020). Increasing the fiscal capacity and human development of East Java: What should a regional government do? *Review of Integrative Business and Economics Research*, 9(4), 99–113. https://sibresearch.org/uploads/3/4/0/9/34097180/riber_9-4_07_s19-034_99-113.pdf
- Lupita, W., & Rahman, A. (2025). Pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah kota dan kabupaten. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 14(09), 1379–1388. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EEB.2025.v14.i09.p11>
- Made, N. P. A., & Suyana, M. (2024). Analisis pengaruh sektor pariwisata dan PDRB terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 13(03), 531–541. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EEB.2024.v13.i03.p10>
- Mauludin, W., & Dewi, R. M. (2020). Rasio kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(3), 116–121. <https://doi.org/10.26740/jupe.v8n3.p116-121>
- Nur, S., Arifin, A., & Anam, S. (2023). Analysis of the influence of fiscal capacity and economic growth on the Human Development Index. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(2), 877–894. <https://jurnal.feb-umi.id/index.php/ATESTASI/article/view/966>
- Puspita, D., & Hamidi, U. S. (2021). *Desentralisasi fiskal dua dekade implementasi*. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 1–289.

- Rahma, F., Yunarsi, Wilda, & Dewi Yulianti. (2022). Pengaruh kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 13–19. <https://doi.org/10.57151/jeko.v1i2.9>
- Wardhana, A., Kharisma, B., & Risti, S. (2022). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Indonesia Timur. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, December, 1480. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i12.p04>
- Wibawa, G. R., & Arif, A. (2022). Analisis kinerja keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 3(2), 88–100. <https://doi.org/10.36423/jumper.v3i2.902>